

**POTENSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN SERTA
PERANANNYA DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA**

Aulia Dyas Puspa, Agustono, Nuning Setyowati

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Surakarta 57126, Telepon +62 271 637457

Email: puspaaulia1@gmail.com Telp. 082242043114

Abstract: This study aims to identify the agricultural, forestry and fishery sector base and non-base in the Surakarta Ex-Residency and know the role of the agricultural, forestry and fishery sector in reducing income inequality in the Surakarta Ex-Residency. The basic method used is analytical description method. Methods of data analysis include: (1) Minimum Requirements Technique (MRT); (2) Williamson Index. The results showed that: (1) the basic agricultural, forestry and fishery sector was in Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar and SragenRegency; (2) Non-base agriculture, forestry and fishery sector is located in Sukoharjo Regency; (3) Agriculture, forestry and fishery sector in Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar and SragenRegency play a role in reducing income inequality. Advice to each Government is develop agriculture, forestry and fishery sector with keeping the comoditi which have a high potency, increase individual skill who play a role in agriculture, forestry and fishery sector, also expanding UMKM which is produce an agriculture, forestry and fishery's product.

Keywords: Agriculture, Forestry andFishery Sector, Base, Non-base, Inequality of income

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis dan non basis di Eks Karesidenan Surakarta dan mengetahui peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Eks Karesidenan Surakarta. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode analisis data meliputi: (1) *Minimum Requirements Technique* (MRT); (2) Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis berada di Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen; (2) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan non basis terdapat di Kabupaten Sukoharjo. (3) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen memiliki peranan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten adalah mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan cara mempertahankan komoditas yang memiliki potensi tinggi, mengadakan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM yang mengolah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta memajukan UMKM pengolahan hasil produksi pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kata Kunci: Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Basis, Non basis, Ketimpangan pendapatan

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (BPS Sukoharjo, 2015).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat salah satunya dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional atau nilai Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional. Menurut (BPS Sukoharjo, 2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010, PDRB disusun oleh 17 sektor penyusun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki nilai serta kontribusi yang besar ke dalam nilai total PDRB di Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2015 menurut lapangan usaha sektor perekonomian di Eks Karesidenan Surakarta.

Tabel 1. Nilai dan Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun Dasar 2010 di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 (Dalam Juta Rupiah)

No	Sektor Perekonomian	PDRB	
		Nilai	Kontribusi (%)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	20.693.212,07	16,95
2	Pertambangan dan Pengalihan	2.800.463,29	2,29
3	Industri Pengolahan	40.387.652,11	33,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	151.619,75	0,12
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah	76.642,66	0,06
6	Konstruksi	7.770.003,02	6,37
7	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda	20.780.359,33	17,02
8	Transportasi dan Pergudangan	4.492.794,92	3,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.896.486,84	3,19
10	Informasi dan Komunikasi	3.340.301,86	2,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.687.065,49	3,02
12	Real Estate	1.848.567,16	1,51
13	Jasa Perusahaan	436.790,58	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.951.067,82	2,42
15	Jasa Pendidikan	5.669.281,49	4,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.069.982,93	0,89
17	Jasa Lainnya	2.019.913,64	1,65
Total		122.072.204,93	100

Sumber : PDRB Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen Tahun 2015, diolah

Tabel 1. Menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar nomor tiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan motor. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 16,95% dari total nilai PDRB di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini merupakan sektor unggulan terlihat dari nilai PDRBnya. Sektor tersebut dapat dikembangkan guna menjadi sektor tumpuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang baik tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Eks Karesidenan Surakarta.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di Negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian (Arsyad, 2004). Oleh karenanya, dengan adanya potensi yang baik pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Eks Karesidenan Surakarta maka apabila dikembangkan lebih baik maka akan membantu pembangunan ekonomi yang akan membantu kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan pada pembangunan ekonomi tentunya akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, terjadi karena pembangunan ekonomi yang dilakukan masing-masing daerah tidaklah sama sehingga akan menghasilkan produk akhir yang berbeda yang berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan ekonomi. Perbedaan potensi daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pembagian pendapatan dari hasil produk akhir yang

didapatkan setiap perorangan dikarenakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan besaran nilai PDRB total, sektor yang menjadi potensi daerah juga jumlah sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi besar terhadap nilai total PDRB diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Eks Karesidenan Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta yang memiliki potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis (2) mengetahui peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Surakarta

METODE PENELITIAN

Metode Dasar Penelitian

Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analisis.

Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian dilakukan di Kabupaten yang terdapat Eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan dengan melihat besaran nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2013 memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan Eks Karesidenan lain di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali,

klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. RPJMD daerah tahun 2011-2015 serta data yang diberikan Dinas Pertanian masing-masing Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari dokumen yang ada di instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian. Wawancara dengan Pemerintah Daerah yang dapat mewakili dari hasil penelitian. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

Metode Analisis Data

1. Identifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Basis Non Basis Berdasarkan Pendekatan *Minimum Requirements Technique* (MRT)

Identifikasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis dan non basis dilakukan dengan tujuan mengetahui sektor pertanian manakah yang menjadi basis dan non basis di masing-masing Kabupaten yang tergabung dalam Eks Karesidenan Surakarta. Identifikasi sektor basis dan non basis dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Minimum Requirements Technique* (MRT). Berdasarkan konsep-konsep utama dalam memperhitungkan sektor basis dengan menggunakan MRT, daerah yang memiliki pangsa terkecil diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki nilai minimum dan dipandang sebagai patokan bahwa daerah tersebut memerlukan barang dan jasa industri untuk memenuhi permintaan lokal (Dinc, 2002) *Minimum Requirements Technique* (MRT) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut (Dinc, 2002).

$$Share = \frac{E_{ir}}{E_r}$$

Dimana E_{ir} adalah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan i di wilayah r, E_r adalah total PDRB 17 sektor di wilayah r, i adalah sektor pertanian, kehutan dan perikanan dan r adalah 6 Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta.

Formulasi tersebut digunakan untuk mengetahui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten manasajakah yang menjadi basis dan non basis adapun wilayah tersebut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. *Share* paling kecil kemudian diidentifikasi sebagai minimum requirement untuk konsumsi local, atau disebut dengan non-basis aktivitas ekonomi. *Share* yang lebih besar daripada *Minimum Requirement* mengimplikasikan bahwa sebagian dari produksi industri adalah ditujukan untuk diekspor ke wilayah lain (Thulin, 2014).

2. Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Berikut adalah formulasi dari indeks ketimpangan pendapatan antar daerah yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson (Sjafrizal, 2014) :

$$VW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y} \text{ yaitu } 0 < VW < 1$$

Dimana VW adalah Indeks Williamson, y_i adalah PDRB perkapita Kabupatendi Eks Karesidenan Surakarta, y adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah Eks Karesidenan Surakarta, f_i adalah Jumlah penduduk Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta dan n adalah Jumlah penduduk seluruh daerah Eks Karesidenan Surakarta.

Formulasi diatas digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan

pendapatan yang terjadi apabila mengikutsertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di dalam perhitungan PDRB total. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan apabila memasukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan apabila tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hasil yang didapat akan mengindikasikan peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Adapun formulasi untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan apabila tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y} \text{ yaitu } 0 < V_w < 1$$

Dimana :

V_w adalah Indeks Williamson, y_i adalah PDRB per kapita tanpa PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta, y adalah PDRB per kapitarata-rata seluruh daerah Eks Karesidenan Surakarta, f_i adalah Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta dan n adalah Jumlah penduduk seluruh daerah Eks Karesidenan Surakarta.

Menurut Arsyad (2010), Ada tiga kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson, yaitu Jika Indeks Williamson menunjukkan :

- 1) Angka 0,0 sampai 0,2 maka ketidakmerataan rendah
- 2) Angka 0,21 sampai 0,35 maka ketidakmerataan sedang, dan
- 3) Angka >0,35 maka ketidakmerataan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

- a. Identifikasi Sektor Pertanian Basis dan Non Basis Berdasarkan Pendekatan *Minimum Requirements Technique* di Eks Karesidenan Surakarta.

Minimum Requirement Technique digunakan untuk melihat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis-non basis dengan wilayah yang digunakan adalah Kabupaten yang tergabung di Eks Karesidenan Surakarta. Adapun hasil analisis tersebut adalah:

Tabel 2. Hasil Identifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Basis dan Non Basis Pada Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta Berdasarkan *Minimum Requirements Technique* (MRT) Tahun 2011-2015

Kabupaten	Share				
	2011	2012	2013	2014	2015
Boyolali	0,25	0,25	0,24	0,22	0,23
Klaten	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12
Sukoharjo	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Wonogiri	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
Karanganyar	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
Sragen	0,20	0,19	0,19	0,17	0,16

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil analisis data MRT diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan basis terdapat di Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen selama tahun 2011-2015. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan non basis dari tahun 2011-2015 yaitu Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun berturut-turut memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang non basis, terjadi karena nilai *share* paling rendah berada di Kabupaten

tersebut. Kabupaten lain yang menjadi basis memiliki artian bahwa memiliki nilai *share* lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Sukoharjo.

- b. Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Eks Karesidenan Surakarta

Nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Eks Karesidan Surakarta tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Eks Karesidenan Surakarta	
	Vw	
	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian
2011	0,17	0,23
2012	0,17	0,23
2013	0,15	0,22
2014	0,14	0,21
2015	0,14	0,20

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 3. menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Eks Karesidenan Surakarta dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2011-2015 berkisar antara 0,14-0,17. Angka ini tergolong rendah karena masih berada pada rentang 0,0-0,20. Adapun nilai Indeks Williamson ini berubah setelah melakukan perhitungan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Angka tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

nilai tersebut selama tahun 2011-2015 adalah berkisar antara 0,20-0,23. Angka ini tergolong dalam kategori rendah hingga sedang.

Perhitungan juga dilakukan untuk mengetahui nilai ketimpangan pendapatan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) di tiap Kabupaten yang tergabung di Eks Karesidenan Surakarta. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa Sektor Pertanian tiap Kabupaten yang Tergabung di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015

Kabupaten	Vw	
	Dengan Pertanian	Tanpa Pertanian
Boyolali	0,07	0,08
Klaten	0,13	0,14
Sukoharjo	0,07	0,07
Wonogiri	0,07	0,09
Karanganyar	0,06	0,06
Sragen	0,08	0,10

Sumber : Hasil Analisis Data

Tabel 4|. menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di tiap Kabupaten yang tergabung di Eks Karesidenan Surakarta dalam rentang 5 tahun (2011-2015) adalah tergolong rendah. Angka tersebut tergolong rendah karena masih berada dalam rentang 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson tersebut pun berbeda antara dengan dan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam mengurangi tingkat

ketimpangan pendapatan yang terjadi di tiap Kabupaten yang tergabung di Eks Karesidenan Surakarta.

2. Pembahasan

a. Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten yang memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang basis selama lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2015 berdasarkan perhitungan menggunakan alat analisis *Minimum Requirement Technique*. Hal ini memiliki artian bahwa Kabupaten Boyolali mampu memenuhi kebutuhan lokalnya dan dapat melakukan ekspor apabila memiliki surplus. Nilai dan produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tinggi menunjang sektor tersebut menjadi sektor yang basis dan apabila dikembangkan lebih lanjut dapat menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi di daerahnya.

Nilai dan produksi yang tinggi dalam berbagai subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi masukan yang tinggi dalam perhitungan PDRB daerah. Berbagai macam komoditas yang memiliki produksi tinggi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi komoditas unggulan daerah tersebut, seperti pada subsektor tanaman bahan pangan dimana sayur-sayuran di Kabupaten Boyolali memiliki nilai produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Eks Karesidenan Surakarta. Hewan ternak seperti sapi perah di Kabupaten Boyolali juga

masih menjadi unggulan dibandingkan dengan Kabupaten lain.

Adanya masukan nilai yang besar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menjadikan sektor tersebut memiliki peranan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Nilai Indeks Williamson dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan dengan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di perhitungan PDRB daerah Boyolali.

b. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki hasil analisis MRT pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah bernilai basis. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Klaten memiliki nilai share yang lebih besar dibandingkan dengan nilai minimum menjadikan sektor tersebut menjadi sektor basis. Kabupaten Klaten dapat memenuhi permintaan lokal terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta mengekspornya apabila terjadi surplus pada sektor tersebut.

Pengembangan komoditas unggulan seperti perikanan darat terutama pada budidaya yang dilakukan di kolam dapat menghasilkan nilai produksi besar pada nilai PDRB. Produksi Padi Sawah yang tergolong tinggi apabila dipertahankan selain dapat digunakan sebagai pemenuhan lokal juga dapat dilakukan ekspor ke daerah lain yang memiliki produksi padi rendah.

Nilai Indeks Williamson selama rentang 2011-2015 di Kabupaten tergolong rendah, dimana masih dalam kategori 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson dengan menyertakan

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Klaten.

3. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten yang kecil dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil pertanian yang ada di Kabupaten ini pun tidak terlalu besar. Seperti pada sektor perikanan dan perkebunan, daerah ini memiliki hasil pertanian dan perikanan yang tidak cukup baik. Namun, pada bahan tanaman pangan, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai produksi yang lumayan bagus pada komoditas sawah, produktivitasnya pun menjadi yang paling baik di antara Kabupaten lain. Sayangnya, nilai produksi padi sawah saja tidak cukup. Produksi pertanian dari subsektor lainnya hanya menghasilkan nilai yang cukup apabila dibandingkan dengan hasil produksi Kabupaten lain. Nilai sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tidak terlalu tinggi tersebut setelah dihitung menggunakan MRT menghasilkan hasil bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut adalah non-basis.

Nilai Indeks Williamson selama rentang 2011-2015 di Kabupaten tergolong rendah, dimana masih dalam kategori 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun

tetap memiliki nilai Indeks Williamson yang lebih rendah apabila menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan namun tidak signifikan.

4. Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri dianggap menjadi Kabupaten yang memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang paling baik di lingkup Eks Karesidenan Surakarta. Sewajarnya apabila sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut menjadi sektor yang basis. Hasil produksi pertanian Kabupaten Wonogiri ini memang paling tinggi terlihat dari PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikananannya. Banyak komoditas unggulan yang dibudidayakan di daerah ini. Misalnya adalah ubi kayu, nilai produksi ubi kayu di Kabupaten Wonogiri adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain. Begitu pula dengan hasil pertanian lain, seperti jagung dan padi sawah. Iklim dan geografi yang mendukung inilah sehingga sektor ini mampu menjadi unggulan di Kabupaten Wonogiri.

Nilai Indeks Williamson ini tentunya terpengaruh dengan besaran nilai PDRB perkapita masing-masing daerah. PDRB perkapita dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tinggi menjadikan Kabupaten Wonogiri memiliki selisih yang cukup banyak di nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama rentang 2011-2015 di

Kabupaten Wonogiri tergolong rendah, dimana masih dalam kategori 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonogiri.

5. Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang basis. Artinya Kabupaten Karanganyar tidak perlu melakukan impor pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena mampu mencukupi kebutuhan lokalnya. Kabupaten Karanganyar memiliki pemasukan yang cukup baik dari sektor tersebut terhadap pembentukan nilai PDRB total. Hasil pertanian yang paling menonjol dibandingkan dengan Kabupaten lain adalah hasil dari komoditas sayuran dan buah-buahan. Dengan iklim dan geografis yang memadai, maka tanaman komoditas tersebut dapat dengan mudah dibudidayakan.

Nilai Indeks Williamson selama rentang 2011-2015 di Kabupaten Karanganyar tergolong rendah, dimana masih dalam kategori 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan dalam

mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karanganyar. Adapun pentingnya pengembangan UMKM serta individu yang berperan dalam sektor pertanian, karena dapat membantu mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Menurut (Brata dalam Baransana et.al, 2015) bahwa terjadi hubungan timbal balik antara pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia, dimana kualitas pembangunan manusia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya ekonomi yang baik mendukung pembangunan sumberdaya manusia.

6. Kabupaten Sragen

Nilai *share* sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sragen yang dianalisis menggunakan *Minimum Requirement Technique* selama lima tahun berturut-turut berada diatas nilai *share minimum* yang ada. Hal tersebut memiliki arti bahwa Kabupaten Sragen memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang basis. Kabupaten Sragen dianggap mampu memenuhi kebutuhan lokal pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga tidak perlu untuk melakukan impor dari daerah lain.

Nilai Indeks Williamson selama rentang 2011-2015 di Kabupaten Sragen tergolong rendah, dimana masih dalam kategori 0,0-0,20. Nilai Indeks Williamson dengan menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah lebih rendah dibandingkan tanpa menyertakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan berperan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sragen.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan identifikasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menggunakan Minimum Requirements Technique (MRT) selama tahun 2011-2015 dihasilkan bahwa Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang basis. Kabupaten Sukoharjo memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang non-basis selama tahun 2011-2015.
2. Berdasarkan analisis Indeks Williamson diketahui angka ketimpangan pendapatan tiap Kabupaten di Eks Karesidenan Surakarta. Nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara berturut-turut Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen adalah 0,07; 0,13; 0,07; 0,07; 0,06; dan 0,08. Sedangkan tanpa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara berturut-turut 0,08; 0,14; 0,07; 0,09; 0,06 dan 0,10.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Boyolali diharapkan mampu mempertahankan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peranan tinggi dalam nilai PDRB perkapita. Mengembangkan potensi sektor yang memiliki nilai tinggi seperti pada subsektor peternakan terutama pada jenis ternak sapi perah, sapi potong serta ayam ras pedaging. Mengembangkan komoditi sayur-sayuran yang dapat berkembang dengan baik di lingkungan Boyolali seperti Cabe Rawit, Wortel dan Bawang Merah.

Menggerakkan kegiatan agroindustri yang dapat dilakukan oleh masyarakat Boyolali dengan bahan baku dari daerahnya sendiri untuk menaikkan nilai produk serta mengembangkan variasi yang beragam.

2. Pemerintah Daerah Klaten diharapkan untuk mempertahankan serta mengembangkan lebih lanjut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sudah menjadi basis. Pengembangan perikanan darat terutama pada budidaya yang dilakukan di kolam dapat menghasilkan nilai produksi besar pada nilai PDRB. Pengembangan pada sektor ternak, terutama pada hewan ternak Sapi Potong dan Itik. Produksi Padi Sawah yang tergolong tinggi hendaknya mampu dipertahankan, sehingga kebutuhan daerah akan dapat terpenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Pemberian penyuluhan terhadap pelaku usaha pertanian dapat dilakukan untuk memberikan arahan terkait pengembangan SDM serta guna memberikan ilmu pengolahan pasca panen.
3. Pemerintah Daerah Sukoharjo diharapkan untuk mampu mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan agar mampu menjadi Kabupaten yang memiliki kecukupan dalam kebutuhan lokalnya. Seperti mengembangkan sektor tanaman bahan pangan yang memiliki produksi tinggi seperti tanaman padi dan jagung. Mengembangkan sektor peternakan khususnya ternak unggas yang memberikan masukan besar kepada PDRB. Mengembangkan UMKM yang bergerak pada pengolahan hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
4. Pemerintah Daerah Wonogiri diharapkan untuk meneruskan program dan misi yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Mengembangkan sektor yang

menjadi basis, seperti komoditi Padi Sawah, Jagung dan Ubi kayu pada subsektor bahan tanaman pangan, Ayam ras pedaging dan Ayam sayur dalam subsektor peternakan, serta pengembangan subsektor perikanan terutama di budidaya karamba dan tambak. Selain mengembangkan subsektor perlu adanya pengembangan SDM. SDM ini dapat diberikan pelatihan berupa penyuluhan pelaksanaan pertanian berkelanjutan dan pengolahan pasca panen. Diharapkan masyarakat dapat berinovasi dalam mengembangkan produk hasil pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

5. Pemerintah Daerah Karanganyar diharapkan untuk mempertahankan serta mengembangkan lebih lanjut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang sudah menjadi basis. Produksi Padi Sawah dan Ubi Kayu yang tergolong tinggi hendaknya mampu dipertahankan dan terus dikembangkan. Pengembangan subsektor peternakan juga dapat dilakukan, mengingat subsektor ini memiliki beberapa jenis ternak yang potensial, seperti pada jenis ternak Ayam dan Itik. Pemberian penyuluhan terhadap pelaku usaha pertanian dapat dilakukan untuk memberikan arahan terkait pengembangan SDM serta guna memberikan ilmu terkait pengolahan dan perawatan yang benar dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
6. Pemerintah Daerah Sragen diharapkan mampu mempertahankan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peranan tinggi dalam nilai PDRB perkapita. Mengembangkan potensi komoditi tanaman bahan makanan yang dapat berkembang dengan baik di lingkungan Sragen seperti Padi Sawah dan Jagung. Memulai

mengembangkan subsektor yang belum berkembang seperti kerbau atau kuda, juga terus mempertahankan dan mengembangkan jenis ternak yang sudah berkembang baik seperti Ayam ras petelur dan Ayam kampung. Menggerakkan kegiatan agroindustri serta memberikan binaan kepada UMKM yang sedang berkembang untuk terus bisa melakukan kegiatan produksi dan melakukan inovasi dalam pengembangan produk olahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2016*. Karanganyar.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2014*. Semarang.
- 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Boyolali Menurut Lapangan Usaha (Tahun Dasar 2010) Tahun 2011-2015*. Boyolali.
- 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*. Wonogiri.
- 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015*. Klaten.
- 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sragen Tahun 2011-2015*. Sragen.

-
2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015*. Sukoharjo.
-
2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015*. Karanganyar.
- Baransano, M.A, Putri, E.I.K, Achsani, N.A, Kolopaking L.M. 2016. Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in thr Provinc of west Papua. *Journal of Economics amd Development Studies*. Volume 4, Nomor 2, Halaman 115-128.
- Brata, A. G. 2002. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal EkonomiPembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 7, No.2. Hal 113-122. (Human Development and Regional Economic Performance in Indonesia. *Journal of Economic Development. Economic Analysis of Underdeveloped Country*,7(2), 113-122)
- Dinc M 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*. Washington, DC : The World Bank
- Sjafrizal. 2014.*Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Todaro, M P dan Stephen C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Thulin, Per. 2014. *Local Multiplier and Economic Base Analysis*. Research Network Debate. Swedish Entrepreneur Forum.